SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

Muhammad Nurmansyah Agustria

NPM: 22.10.0016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NURMANSYAH AGUSTRIA

NPM : 22100016

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL : TINJAUN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2025

PALEMBANG, AGUSTUS 2026

MENYETUJUI,

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
HJ SURYANI YUSI ,S,H,M,HUM	HJ SAKINAH AGUSTINA S,H,M,HUM

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Emiwati S,H,,,M,HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURMANSYAH AGUSTRIA

NPM : 22100016

Tempat/Tanggal LAhir : Palembang, 21 Maret 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, imprestasi serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan utuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

g, Agustus 2026



Muhammad Nurmansyah.Agustria

22100016

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena salah tangkap (*error in persona* atau *disqualification in person*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. meskipun Indonesia telah melakukan langkah progresif dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP Baru) untuk meminimalisir abuse of power, dalam realitas sosiologis masih terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (das sollen) dengan praktik penegakan hukum (das sein).

Korban salah tangkap mengalami kerugian multidimensi, baik fisik, psikologis, maupun hancurnya martabat social , penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 serta mengkaji bentuk pemulihan keadaan kembali *(restitutio in integrum*) yang diberikan oleh negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). sumber data utama berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 176 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 membawa paradigma baru yang lebih akuntabel. Regulasi ini memperluas spektrum rehabilitasi (sosial, medis, psikologis, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial) serta mengkriminalisasi tindakan abuse of power aparat melalui Pasal 278 sebagai bentuk akuntabilitas personal (individual criminal responsibility). Pemulihan yang diberikan negara dianalisis melalui kesetaraan formal dan kesetaraan substantif (keadilan proporsional) karena derajat dampak kerusakan yang diderita setiap korban berbeda-beda secara kontekstual di masyarakat.

ABSTRACT

*This research is motivated by the prevalence of wrongful arrest phenomena (*error in persona or disqualification in person*) within Indonesia's criminal justice system. Although Indonesia has taken progressive steps by enacting law number 20 of 2025 concerning Criminal Procedure Law (the New KUHAP) to minimize the abuse of power, a significant gap remains in sociological reality between legal norms (das sollen) and law enforcement practices (das sein). Victims of wrongful arrest suffer multidimensional harm, encompassing physical and psychological injury as well as the destruction of their social dignity. This study aims to analyze the legal protection framework for victims of wrongful arrest under Law No. 20 of 2025 and to examine the forms of restoration (restitutio in integrum) provided by the state.*

The research employs a normative-juridical method utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The primary data source consists of secondary data—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative approach.

The findings indicate that Law No. 20 of 2025 introduces a new, more accountable paradigm. The regulation expands the scope of rehabilitation (covering social, medical, psychological, empowerment, and social reintegration aspects) and criminalizes acts of abuse of power by officials under Article 278, thereby establishing a framework for individual criminal responsibility. State-provided restoration is analyzed through the lenses of formal equality and substantive equality (proportional justice), acknowledging that the severity of the harm suffered by each victim varies according to their specific social context.